



Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangun Rejo

Evaluasi Kebijakan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Dedi Setiawan & Yurial Arief Lubis*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dana Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparat desa dan masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa telah memberikan dampak positif dalam pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan desa dan fasilitas umum, serta dalam pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya transparansi pengelolaan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, transparansi berbasis teknologi, dan keterlibatan masyarakat agar pengelolaan Dana Desa lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa; Kebijakan Publik; Pembangunan Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Efektivitas Program.

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the Village Fund policy in improving community welfare in Bangun Rejo Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. The Village Fund is a government program that aims to support infrastructure development, economic empowerment, and the improvement of public services at the village level. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consist of village officials and the community who have experience in managing the Village Fund. The results of the study show that the Village Fund policy has had a positive impact on infrastructure development, such as the improvement of village roads and public facilities, as well as in economic empowerment through business capital assistance and skills training. However, the effectiveness of this policy still faces obstacles, such as limited capacity of village officials, lack of transparency in budget management, and low community participation in supervision. Therefore, it is necessary to increase the capacity of the apparatus, technology-based transparency, and community involvement so that the management of the Village Fund is more optimal and sustainable.

Keywords: Village Fund; Public Policy; Village Development; Community Welfare; Program Effectiveness.

How to Cite: Setiawan, D., & Lubis, Y. A. (2025). Evaluasi Kebijakan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(1) 2025: 59-67,

*E-mail: yurialarief@staff.uma.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan publik, implementasi di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal (Boedijono et al., 2019; Jamaluddin et al., 2018). Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta rendahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif. Selain itu, ditemukan beberapa kasus ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, seperti proyek infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keterlambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi (Audia et al., 2020; Mirayanti & Fiansi, 2020). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan melemahkan tujuan utama Dana Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal.

Salah satu persoalan yang sering ditemukan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Rejo adalah ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan drainase sering kali tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan warga setempat, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal. Selain itu, ada beberapa program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan tanpa kajian mendalam mengenai potensi lokal dan kebutuhan pasar, sehingga tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, program pelatihan keterampilan bagi warga desa sering kali tidak diikuti dengan dukungan modal usaha atau akses pasar yang memadai, sehingga hasil dari program ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan program Dana Desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana anggaran Dana Desa digunakan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa (Hakim & Pakam, 2014; Sugiharti & Ramdan, 2019). Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, yang seharusnya dilakukan melalui musyawarah desa (musdes). Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipatif yang menjadi salah satu landasan utama dalam pengelolaan Dana Desa. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana atau praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat secara luas (Hargoro, 2023; Widuri Wulandari et al., 2023).

Permasalahan ini semakin diperparah dengan rendahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran dan administrasi keuangan secara profesional. Berdasarkan temuan awal, masih banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana, pengalokasian anggaran yang tidak efektif, serta laporan pertanggungjawaban yang kurang transparan. Padahal, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Mahhliani, Arifin, dan Murjani (Mahhliani et al., 2018) meneliti pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan

infrastruktur jalan di Desa Banua Rantau dan menemukan bahwa implementasi kebijakan ini cukup baik serta sesuai peruntukannya, meskipun fokusnya terbatas pada infrastruktur. Damanik & Marom (Damanik & Marom, 2016) mengkaji kebijakan pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan, meskipun tidak secara langsung meneliti Dana Desa. Zainuddin & Guntur (Zainuddin & Guntur, 2021) mengevaluasi penggunaan Dana Desa di Desa Massamaturu dan menyoroti perlunya peningkatan anggaran serta efisiensi dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Studi-studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian di Desa Bangun Rejo dalam hal menilai efektivitas kebijakan desa, namun penelitian di Bangun Rejo lebih luas dalam mengevaluasi transparansi, efisiensi, serta dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa dilakukan di Desa Bangun Rejo. Apakah pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan? Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan regulasi yang ada? Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan dana desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan informan, dengan fokus pada individu yang memiliki wawasan mendalam terkait kebijakan dana desa, seperti kepala desa, bendahara desa, kepala urusan perencanaan, kepala seksi kesejahteraan, serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang akurat dan kontekstual. Teknik analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, serta validasi melalui member checking dengan informan.

Dalam proses pengumpulan data, observasi dilakukan secara langsung untuk memahami kondisi pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa, sementara wawancara dilakukan dengan informan kunci guna menggali perspektif mereka terhadap implementasi kebijakan. Dokumentasi melengkapi data yang diperoleh, berupa dokumen resmi, laporan desa, serta kebijakan terkait yang diterapkan di wilayah tersebut. Melalui teknik analisis induktif, penelitian ini berupaya menyusun pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Bangun Rejo, dengan jadwal penelitian yang berlangsung dari Desember 2024 hingga Juni 2025. Rangkaian penelitian meliputi penyusunan proposal, seminar, pengumpulan data lapangan, penyusunan skripsi, hingga sidang dan revisi akhir. Dengan pendekatan yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi kebijakan dana desa serta mengusulkan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Dana Desa di Desa Bangun Rejo Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan Dana Desa merupakan bagian dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memperkuat desa sebagai entitas pemerintahan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal (Oates, 1993), pelimpahan kewenangan ke tingkat lokal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi alokasi Dana Desa sebagai instrumen pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Dana Desa berperan dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan dasar. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat. Teori implementasi kebijakan Edward III (Levitt, 1980) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada empat faktor utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), serta struktur birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan Dana Desa diterapkan di Desa Bangun Rejo serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya, Dana Desa di Desa Bangun Rejo digunakan untuk berbagai program pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta peningkatan layanan publik. Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan (Estupiñán & Alvarez, 2016), pembangunan desa harus mencakup tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990), peningkatan infrastruktur dapat menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, pembangunan jalan desa yang lebih baik memungkinkan petani dan pedagang untuk lebih mudah mengangkut hasil panen ke pasar, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, pembangunan drainase yang baik dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat, sesuai dengan prinsip good governance dalam pelayanan publik (UNDP, 1997).

Selain pembangunan fisik, Dana Desa juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Desa Bangun Rejo telah mengalokasikan sebagian anggaran untuk program bantuan modal dan pelatihan keterampilan. Teori pemberdayaan masyarakat (Chambers, 1995) menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaannya agar mereka memiliki kendali atas kesejahteraannya sendiri. Dalam konteks ini, pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi pelaku usaha di desa dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola bisnis. Program bantuan modal juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memulai atau memperluas usaha mereka tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Menurut teori modal manusia (Caire & Becker, 1967), peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah Desa Bangun Rejo telah

mengalokasikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendidikan seperti renovasi sekolah dasar, penyediaan alat tulis bagi siswa kurang mampu, serta pemberian insentif bagi guru honorer. Di sektor kesehatan, Dana Desa digunakan untuk mendukung program Posyandu, penyediaan fasilitas kesehatan dasar, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Misalnya, penyediaan alat kesehatan dasar dan pemberian vitamin bagi balita bertujuan untuk menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Meskipun kebijakan Dana Desa memiliki dampak positif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Van Meter & Van Horn, 1975), efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kejelasan tujuan, sumber daya yang tersedia, serta dukungan dari pelaksana kebijakan dan masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam implementasi Dana Desa di Desa Bangun Rejo adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Banyak aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Dana Desa menyebabkan partisipasi mereka dalam pengawasan masih rendah. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa sering menjadi celah bagi penyalahgunaan anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam teori transparansi dan akuntabilitas publik (HOOD, 1991). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak desa di Indonesia yang mengalami kasus penyelewengan dana akibat lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan sistem pengawasan yang ketat agar Dana Desa dapat digunakan secara optimal. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah digitalisasi administrasi desa, yang memungkinkan setiap transaksi keuangan dipantau lebih efektif dan dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan keterbukaan informasi.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Dana Desa di Desa Bangun Rejo, diperlukan berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat melalui musyawarah desa yang lebih inklusif serta pemanfaatan media digital untuk penyebaran informasi terkait penggunaan dana. Optimalisasi teknologi dalam pencatatan dan pelaporan anggaran desa akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan pengelolaan yang lebih transparan, berbasis partisipasi, dan sesuai kebutuhan lokal, Dana Desa dapat menjadi instrumen utama dalam pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangun Rejo.

Efektivitas Kebijakan Dana Desa di Desa Bangun Rejo

Kebijakan Dana Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik. Sejak diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran dari APBN sesuai dengan kebutuhan lokal. Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu penerima Dana Desa yang diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaannya. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih dipertanyakan mengingat adanya tantangan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan kebijakan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur. Di Desa Bangun Rejo, sebagian besar Dana Desa dialokasikan untuk perbaikan jalan, pembangunan drainase, serta renovasi fasilitas umum seperti balai desa dan Posyandu. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Misalnya, jalan yang lebih baik memudahkan petani dan pedagang mengangkut hasil panen ke pasar, yang berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Pembangunan drainase juga mengurangi risiko banjir yang sebelumnya menghambat aktivitas warga. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi proyek infrastruktur ini, seperti anggaran yang terbatas, yang menyebabkan beberapa proyek tertunda atau tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Selain pembangunan infrastruktur, Dana Desa juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program yang dijalankan meliputi pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Di Desa Bangun Rejo, pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga dan pemuda bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha mandiri. Bantuan modal juga diberikan kepada pelaku usaha kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja. Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Banyak usaha yang gagal berkembang secara optimal akibat kurangnya pendampingan dan monitoring berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam akses informasi mengenai prosedur pengajuan bantuan, yang membuat tidak semua masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program ini secara merata.

Dalam sektor pelayanan publik, Dana Desa digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Desa Bangun Rejo telah mengalokasikan dana untuk memperbaiki layanan Posyandu, penyediaan alat kesehatan, serta program penyuluhan gizi bagi balita guna menekan angka malnutrisi. Dalam bidang pendidikan, Dana Desa digunakan untuk merenovasi sekolah dasar, menyediakan bantuan alat tulis bagi siswa kurang mampu, serta memberi insentif kepada guru honorer. Meskipun program ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga medis di Posyandu serta anggaran yang terbatas untuk mendukung program pendidikan secara komprehensif. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program pelayanan publik di desa.

Meskipun kebijakan Dana Desa telah memberikan dampak positif bagi Desa Bangun Rejo, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kapasitas aparatur desa yang masih terbatas dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam mengelola anggaran secara profesional, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana. Beberapa proyek infrastruktur mengalami keterlambatan akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur pengadaan barang dan jasa. Perencanaan yang tidak matang dalam beberapa program pemberdayaan ekonomi juga membuat alokasi dana tidak selalu tepat sasaran, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa juga menjadi kendala serius. Meskipun pemerintah desa telah berusaha menyampaikan laporan keuangan melalui musyawarah desa, banyak warga yang masih kurang memahami bagaimana anggaran desa dialokasikan. Minimnya akses informasi ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan dana desa, yang berujung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Dana Desa di Desa Bangun Rejo, diperlukan beberapa strategi perbaikan. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara lebih sistematis. Pelatihan mengenai tata kelola keuangan desa, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan proyek infrastruktur harus menjadi prioritas. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah desa dapat mengelola Dana Desa secara lebih efektif dan akuntabel. Kedua, transparansi dalam pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah desa dapat menerapkan sistem administrasi digital atau website desa untuk menyajikan laporan keuangan secara terbuka, sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa perlu diperkuat. Pemerintah desa dapat mengadakan forum diskusi atau pertemuan rutin dengan warga untuk membahas perencanaan anggaran dan mengevaluasi program yang telah dijalankan. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, setiap program yang dibiayai Dana Desa akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keempat, pemanfaatan Dana Desa untuk program pemberdayaan ekonomi harus lebih optimal dengan sistem pendampingan yang lebih intensif. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau akademisi untuk membimbing penerima bantuan usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kebijakan Dana Desa diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dengan adanya sistem pengelolaan yang lebih transparan, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat, Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangun Rejo. Evaluasi yang berkelanjutan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan Dana Desa di Desa Bangun Rejo telah memberikan dampak positif, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang lebih konkret perlu diterapkan agar kebijakan ini dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal, Dana Desa dapat menjadi instrumen utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

SIMPULAN

Kebijakan Dana Desa di Desa Bangun Rejo telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta rendahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana secara profesional. Permasalahan ini berdampak pada ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, sehingga beberapa program tidak berjalan optimal dan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam laporan keuangan juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam

proses perencanaan dan pengawasan serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Dana Desa, beberapa strategi perbaikan perlu diterapkan, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan anggaran, optimalisasi teknologi dalam administrasi desa untuk meningkatkan transparansi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa. Selain itu, diperlukan pendekatan berbasis kebutuhan lokal agar program yang dijalankan benar-benar menjawab permasalahan yang ada di desa. Dengan pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, Dana Desa dapat menjadi instrumen utama dalam membangun desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

REFERENSI

- Audia, B. hanita S., Ariffianti, I., & Prathama, B. D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun. *Jurnal Kompetitif*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.47885/kompetitif.v6i2.291>
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*.
- Caire, G., & Becker, G. S. (1967). Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. In *Revue économique* (Vol. 18, Issue 1). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.2307/3499575>
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment & Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11.
- Estupiñán, J. M. T., & Alvarez, J. F. (2016). The age of sustainable development. In *Revista Finanzas y Política Económica* (Vol. 8, Issue 2). Columbia University Press. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.2.1>
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu li Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 1–20.
- Hargoro, A. G. (2023). Implementasi Perbup Kediri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 88–98. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v5i1.1624>
- HOOD, C. (1991). a Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14–25. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Levitt, R. (1980). Implementing public policy (pollution). In *Implementing public policy (pollution)*. Congressional Quarterly Press.
- Mahliani, M., Arifin, J., & Murjani, M. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA BANUA RANTAU KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 1(1), 276–289.
- Mirayanti, M., & Fiansi, F. (2020). EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BUNTUNA KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(1), 50–61.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.3386/w3210>
- Sugiharti, D. K., & Ramdan, A. (2019). Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 57–72. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.16729>

- UNDP. (1997). Governance for sustainable human development - A UNDP policy document. In *United Nations Development Programme*. United Nations Development Programme.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society, 6(4)*, 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widuri Wulandari, Siti Munawaroh, & Agustina Setiawan. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang. *Perspektif, 12(1)*, 345–353. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8661>
- Zainuddin, & Guntur, M. (2021). Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan (Studi DI Desa Massamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1(2)*, 1–10.

